

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Pembangunan Di Desa Paya Geli

Muhammad Brilliant Arlangga¹, Fitri Yani Panggabean²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan di desa Paya Geli. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat dan model fenomena tersebut dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data yang diperoleh dari proses wawancara dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses Pengelolaan Keuangan di desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sudah dilakukan secara efektif dan efisien meskipun masih ada beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan keterlambatan pengiriman dana desa dari pemerintahan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat..

Abstract

This research was conducted in Paya Geli Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency. This research aims to determine the level of success of village financial management in supporting development in Paya Geli Village. This research is a descriptive study with a qualitative approach, namely a method that describes in full and in depth the social reality and various phenomena that occur in the community that is the subject of the study, so that the characteristics, characters, nature and models of these phenomena are described by collecting, preparing, and analyzing data obtained from the interview process and documents. Based on the results of this study, it can be concluded that the process of planning, implementing, administering, reporting and accountability in Financial Management in Paya Geli Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency, has been carried out effectively and efficiently although there are still some obstacles such as lack of socialization and delays in sending village funds from the government.

Keywords: Village Financial Management, Accountability, Transparency, Community Participation.

Copyright (c) 2025 **Muhammad Brilliant Arlangga¹**

✉ Corresponding author :

Email Address : muhammadbrilliant1104@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ramadhan, Fitri, Nia., 2023).

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek krusial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di desa Paya Geli. Otonomi desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mengatur pengelolaan sumber daya keuangan secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dethan, M. A. (2019).

Desa Paya Geli, yang terletak di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari upaya desentralisasi keuangan. ADD yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten merupakan dana yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di desa, baik dalam sektor fisik seperti infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas umum, maupun sektor non-fisik seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Kamuli, S., et al (2023).

Namun, efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Paya Geli masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta partisipasi masyarakat yang masih minim dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi kendala yang harus diatasi. Permasalahan ini sering kali berdampak pada ketidakefisienan penggunaan dana, yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Paya Geli dalam mendukung pembangunan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan strategi pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, sehingga pembangunan di Desa Paya Geli dapat berlangsung secara optimal dan berkesinambungan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Pengelolaan Keuangan di Desa Paya Geli

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)
2021	Rp. 475.502.000
2022	Rp. 473.662.000
2023	Rp. 446.700.000

Sumber: Kantor Kepala Desa Paya Geli

Dengan adanya realisasi anggaran desa dari pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan desa di Desa Paya Geli,

Kecamatan Sunggal. Efektivitas, secara umum, menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan definisi efektivitas menurut Kenneth (2019), yang menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, atau semakin tinggi persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Untuk mengukur efektivitas penggunaan alokasi dana desa di Desa Paya Geli, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kejelasan tujuan yang hendak dicapai sangat penting agar penggunaan dana desa dapat terarah dan hasilnya terukur. Tujuan yang jelas akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, kejelasan strategi pencapaian tujuan juga tidak kalah penting. Strategi yang dirancang haruslah jelas dan logis, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Agency theory atau teori keagenan adalah teori yang berkaitan dengan hubungan kontraktual antara anggota sebuah organisasi. Model yang paling banyak digunakan berfokus hubungan principal dan agent (Ghozali, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan tentang keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban yang melekat pada kewenangan desa, menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan. Pemerintah Desa diberi hak oleh Undang-Undang untuk mencari sumber pendapatan untuk kepentingan desa, berupa dana subsidi, pungutan pajak/retribusi daerah, sumber pendapatan lain yang sesuai ketentuan undang-undang. Kewajiban yang melekat pada Pemerintahan Desa adalah mengeluarkan dana untuk belanja desa dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan di desa (Siregar, 2018).

Menurut Fuji (2015), pembangunan fisik adalah suatu usaha yang dilaksanakan oleh negara, bangsa, atau pemerintah dengan tujuan untuk melakukan aktivitas yang mengarah pada perubahan yang lebih baik dan dapat dilihat dalam bentuk konkret atau nyata. Beberapa indikator pembangunan fisik desa antara lain:

- 1) Infrastruktur desa
- 2) Fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa
- 3) Akses informasi
- 4) Kualitas sumber daya manusia yang unggul
- 5) Pendapatan penduduk

Menurut Wresniwiro (2017), pembangunan nonfisik mencakup peningkatan perekonomian masyarakat desa serta peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Indikator utama dari pembangunan nonfisik meliputi:

- 1) Pembangunan manusia – upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Ekonomi – pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- 3) Kesehatan – peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
- 4) Pendidikan – peningkatan akses, fasilitas, dan kualitas pendidikan.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Paya Geli yang beralamat di Jl. Binjai Km.10 Gg. Damai Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Jenis data adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Statistik Responden Penelitian

Deskripsi statistik responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan sebagai berikut:

a. Deskripsi statistik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 1 Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	45	56.25%
Perempuan	35	43.75%
Total	80	100%

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel di atas menjelaskan responden penelitian didominasi kelompok laki-laki 45 orang (56,25%) dan kelompok perempuan 35 orang 43,75%. Kelompok laki-laki lebih banyak ditemui saat penelitian dilakukan di desa Paya Geli, dan kelompok laki-laki lebih aktif memahami kondisi desa dibanding perempuan.

b. Deskripsi statistik responden berdasarkan usia

Tabel 2 Deskriptif Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	%
20 tahun s/d 30 tahun	10	12.05%
31 tahun s/d 40 tahun	33	41.25%
41 tahun s/d 50 tahun	26	32.05%
50 tahun ke atas	11	13.75%
Total	80	100%

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel di atas menjelaskan deskripsi responden yang didominasi oleh penduduk desa berusia 31 sampai 40 tahun sebanyak 41,25%. Responden dengan usia 41 tahun sampai 50 tahun sebanyak 32,05%. Responden usia 20 tahun sampai 30 tahun sebanyak 12,05% dan responden dengan usia lebih dari 50 tahun sebanyak 13,75% dari keseluruhan jumlah responden.

c. Deskripsi statistik responden berdasarkan pendidikan

Tabel 3 Deskriptif Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	%
SLTA	50	62,50%
S-1	30	37,50%
Total	80	100%

Sumber : Data diolah (2025)

Tabel di atas menjelaskan deskripsi pendidikan responden yang didominasi oleh responden dengan pendidikan SLTA sebanyak 62,50%. Dan sisanya sebanyak 37,50% responden dengan pendidikan S-1 (Sarjana). Walaupun responden berpendidikan S-1 lebih sedikit dari responden berpendidikan SLTA, setidaknya responden dapat memberikan opini yang lebih realistis.

2. Pengelolaan Keuangan Desa Paya Geli Dalam Mendukung Pembangunan

Gambar 1 Keuangan Desa Paya Geli Tahun 2024



Sumber: Kantor Desa Paya Geli (2025)

Realisasi anggaran tahun 2024 memperlihatkan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp.2.588.417.147 yang keseluruhannya telah digunakan untuk belanja pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebesar Rp.2.588.417.147. Ketersediaan keuangan desa yang telah digunakan seluruhnya untuk belanja desa, sehingga di tahun 2024 ini tidak terdapat SiLPA. Artinya untuk tahun 2025 tidak ada dana tambahan untuk menambah penghasilan (pendapatan) desa. Anggaran pendapatan yang tersedia di tahun 2024, seluruhnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana darurat dan mendesak.

Pada pelaksanaan Pengelolaan Keuangan desa, menurut salah satu narasumber yaitu Ibu Jia Khairunnisa selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa:

“Keuangan desa yang tersedia di tahun 2024 seluruhnya telah digunakan untuk program/kegiatan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2024. Terutama pembangunan fisik jalan desa yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan. Sehingga mobilitas warga desa lancar dan dapat mendukung aktivitas masyarakat desa, khususnya aktivitas untuk meningkatkan ekonomi warga.”

Beberapa masyarakat desa Paya Geli memberi komentar atas pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di tahun 2024. Eko menginformasikan merasa bersyukur atas pembangunan dan renovasi jalan yang telah dilakukan Pemerintah Desa. Badol menambahkan ada baiknya pembangunan fisik jalan desa ini berkelanjutan setiap tahunnya untuk jalan lainnya yang ada di desa ini. Ririn menambahkan, merasa puas atas pembangunan jalan desa, namun sebaiknya jalan yang dibangun tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang. Kualitasnya lebih didahulukan daripada jumlah pembangunan jalan itu sendiri, sehingga tidak mubazir penggunaan keuangannya.

3. Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa Paya Geli Dalam Mendukung Pembangunan

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan, digunakan dengan pendekatan yang dirujuk dari Open Budget Indeks yang dipublikasikan oleh International Budget Partnership. Hal-hal yang perlu dilakukan penilaian terhadap pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan, meliputi keberhasilan Pemerintah Desa menjalankan prinsip akuntabilitas, menjalankan prinsip transparansi, dan keberhasilan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan di desa yang bersumber dari keuangan desa.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa Paya Geli dilakukan dengan menggunakan data penelitian yang bersumber dari jawaban kuesioner 80 responden yang memberikan opini tentang indikator pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan yang ditinjau dari prinsip penerapan akuntabilitas (pertanggungjawaban) dengan 9 pertanyaan, transparansi dengan 9 pertanyaan, dan partisipasi masyarakat dengan 10 pertanyaan. Hasil opini responden atas pelaksanaan prinsip pengelolaan keuangan desa Paya Geli dalam mendukung pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penilaian Pengelolaan Keuangan Desa Paya Geli Dalam Mendukung Pembangunan

Indikator	Total Skor	Pertanyaan Kuesioner	Jumlah Responde n	Nilai yang diharapkan	Indeks
(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)
	Lampiran 3			c x d	(b/f) x 100%
Akuntabiliti	560	9	80	720	78%
Transparansi	417	9	80	720	58%
Partisipasi Masyarakat	419	10	80	800	52%
Nilai Pengelolaan Keuangan Desa = (Total b/Total f) x 100 = (1.396/2.240) x 100%					62%
Cukup dengan kategori Substansial					

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan hasil perhitungan penilaian tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa Paya Geli dalam mendukung pembangunan melalui indikator akuntabiliti, transparansi, dan partisipasi masyarakat dengan pendekatan Open Budget Indeks menghasilkan nilai sebesar 62% dengan kualifikasi “Cukup” dengan kategori “Substansial”. Artinya pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan yang dilakukan selama tahun 2024 oleh Pemerintah Desa Paya Geli menunjukkan kualitas yang sudah cukup baik yang memenuhi unsur substansial pengelolaan keuangan desa.

1. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Pembangunan

Kegiatan pengelolaan keuangan desa telah dilakukan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Desa Paya Geli dengan berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan desa sesuai instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2018 yang menghendaki pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa.

Dari aspek akuntabilitas, pemerintah desa Paya Geli sudah semaksimal mungkin menjalankan prinsip akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan. Model pertanggungjawaban yang dilakukan dengan membuat laporan ke Pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan yang lebih tinggi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa. Dalam hal akuntabilitas kepada masyarakat desa, Pemerintah Desa membuat laporan keuangan desa dalam bentuk laporan sumber pendapatan dan penggunaan (belanja) desa selama tahun anggaran. Laporan tersebut selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat desa melalui media infografis yang dipajang di halaman kantor desa, sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa.

Didalam proses pertanggungjawaban, pendapat salah satu responden yaitu Reza Al Fuadi ,emgatakan bahwa:“Model laporan pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan setiap tahunnya memang seperti itu yang dipublikasikan kepada masyarakat. Dan hingga saat ini tidak ada warga desa yang komplin (keberatan) dengan model pertanggungjawaban yang demikian. Alasan seperti ini sepenuhnya tidak bisa diterima. Karena praktek pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa bukan berdasarkan kebiasaan atau atas dasar keberatan warga desa, tetapi lebih kepada patuh dan tunduk kepada perundangan yang berlaku.”

Berdasarkan hal yang demikian, maka disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Paya Geli belum melaksanakan secara utuh praktek akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan, dimana masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam memberikan informasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa.

Dari aspek transparansi, pemerintah desa Paya Geli sudah berupaya untuk melaporkan penggunaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan secara transparan melalui media informasi infografis yang memuat seluruh kegiatan dan penggunaan keuangan desa secara global. Media transparansi yang digunakan melalui media infografis yang dipajang di kantor desa sehingga dapat diakses oleh semua masyarakat desa.

Dengan demikian disimpulkan, bahwa praktek transparansi pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Paya Geli belum sepenuhnya mengikuti keinginan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2018 yang menginginkan pengelolaan keuangan desa diinformasikan melalui media yang mudah diakses dan memberi banyak informasi penggunaan keuangan desa kepada masyarakat desa.

Aspek partisipasi masyarakat pada pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan, Pemerintah Desa Paya Geli telah berupaya mengajak dan mengundang warga desa untuk aktif berpartisipasi dalam membantu kegiatan pembangunan yang di laksanakan di desa.

Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa tidak sepenuhnya seperti yang diperkirakan oleh pihak Pemerintah Desa. Dikarenakan berbagai alasan, sehingga warga desa belum memberikan partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Ternyata sebahagian warga desa berpartisipasi dalam bentuk lain, seperti berpartisipasi dalam memonitoring pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa, dan ada sebahagian masyarakat yang berpartisipasi dengan menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa. Model partisipasi yang diberikan oleh sebahagian warga desa belum menyentuh pada partisipasi dalam melakukan pengawasan pembangunan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, sehingga dari aspek ini fungsi pengawasan oleh masyarakat desa tergolong rendah.

Berdasarkan kondisi yang demikian, maka disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya menunjukkan partisipasi aktif, terutama dalam melakukan pengawasan pembangunan dan pengawasan penggunaan keuangan desa untuk pembangunan desa dan masyarakat desa.

2. Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Pembangunan

Penilaian keberhasilan pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan di desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang diperoleh hasil, bahwa nilai yang diperoleh melalui pendekatan Open Budget Indeks (OBI) adalah sebesar 62%, artinya kualitas pengelolaan keuangan desa Paya Geli termasuk dalam klasifikasi "Cukup" dengan kategori "Substansial".

Penilaian ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan desa Paya Geli sudah cukup baik dalam menjalankan amanah untuk mengelola keuangan desa, dimana prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, dan partisipasi masyarakat desa menunjukkan nilai yang relatif kuat mendukung penilaian pengelolaan keuangan secara keseluruhan mendapat predikat “Cukup” dengan kategori “Substansial”.

Praktek akuntabilitas yang dijalankan oleh Pemerintah Desa mendapat respon yang relatif tinggi dari responden (masyarakat desa) dengan nilai indeks 78%. Setidaknya ada 3 poin penting yang mendorong terciptanya hasil penilaian pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan, seperti; pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terbebas dari persolan hukum, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa telah merubah keadaan desa dan warga desa menjadi lebih baik, serta Kepala Desa dan aparatur desa rutin melakukan monitoring ke masyarakat desa atas pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan untuk pembangunan desa.

Dari sisi lain, terdapat pula sedikitnya tiga hal penting yang berpotensi menjadikan penilaian pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan menjadi rendah, seperti; laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilaporkan tidak detail dan tidak terinci, dan tidak menyertakan alasan (informasi) atas kegiatan yang belum selesai, Pemerintah Desa belum menyediakan media khusus yang dapat digunakan untuk memberikan umpan balik dalam bentuk kritik, saran dan sejenisnya atas kinerja pengelolaan keuangan desa, serta Pemerintah Desa cenderung tidak melibatkan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa.

Praktek transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Paya Geli mendapat respon yang relatif rendah dari responden (masyarakat desa) dengan nilai indeks 58%. Setidaknya ada 3 poin penting yang mendorong kuat terciptanya hasil penilaian pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan, seperti; informasi anggaran dan realisasi pengelolaan keuangan desa diinformasikan ke publik tepat di awal tahun anggaran baru, informasi anggaran dan realisasi penggunaannya memberi manfaat banyak bagi warga desa, serta Pemerintah Desa menerima dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan masyarakat desa kepada Pemerintah Desa atas pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.

Dari sisi lain, terdapat pula sedikitnya tiga hal penting yang berpotensi menjadikan penilaian pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan menjadi rendah, seperti; Pemerintah Desa belum menyediakan media informasi yang mendukung kualitas transparansi pengelolaan keuangan desa seperti webside, media sosial dan sebagainya, Pemerintah Desa belum menyediakan kotak pengaduan atau sejenisnya bagi masyarakat desa untuk menyampaikan keluhannya, serta masyarakat desa masih merasa belum mendapat kemudahan mengakses informasi pengelolaan keuangan desa beberapa tahun ke belakang, karena pihak Pemerintah Desa belum menyediakan media untuk kebutuhan tersebut.

Penilaian atas partisipasi masyarakat desa Paya Geli dalam keterlibatannya pada pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan desa mendapat respon yang relatif rendah dari responden (masyarakat desa) dengan nilai indeks

52%. Setidaknya ada 3 poin penting yang mendorong kuat terciptanya hasil penilaian pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan tersebut, seperti; masyarakat desa menentang keras orang-orang yang ingin merusak hasil pembangunan desa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, masyarakat desa menikmati hasil pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan dana yang berasal dari keuangan desa, serta masyarakat desa aktif ikut menjaga dan memelihara setiap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pada sisi lain terdapat minimal 3 hal penting yang berpotensi memberikan penilaian rendah terhadap partisipasi masyarakat, diantaranya: masyarakat desa cenderung kurang aktif melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa, masyarakat desa enggan melibatkan diri secara sukarela dalam setiap kegiatan pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa, serta masyarakat desa masih merasa belum puas dengan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan dana yang berasal dari keuangan desa.

Dari beberapa poin kelebihan dan kekurangan dalam penilaian aspek pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan yang meliputi aspek akuntabilitas, aspek transparansi, dan aspek partisipasi masyarakat desa, diperoleh kesimpulan akhir bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa Paya Geli dalam mendukung pembangunan berada dalam tingkat keberhasilan dengan nilai 62% masuk dalam klasifikasi "Cukup" dengan kategori "Substansial". Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurlailah, et.al (2020) yang menyimpulkan rata-rata tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan dengan nilai sebesar 70,5% yang termasuk dalam klasifikasi "Cukup" dengan kategori "Substansial".

SIMPULAN

- 1) Tingkat efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung pembangunan di Desa Paya Geli dapat dikatakan efektif dan efisien, meskipun masih ada beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan keterlambatan pengiriman dana desa dari pemerintahan. Untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan, seperti: Pencapaian Tujuan, Ketepatan Waktu, Kualitas Pengelolaan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan dana desa di Desa Paya Geli telah efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan desa. Namun, masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam beberapa aspek untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa.
- 2) Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pembangunan di desa Paya Geli:
 - a. Faktor Internal: Ketersediaan Sumber Daya, Kepemimpinan dan Pengelolaan, Partisipasi Masyarakat, Kapasitas dan Kemampuan.
 - b. Faktor Eksternal: Kebijakan Pemerintah, Dukungan Dana, Akses ke Teknologi, Lingkungan dan Bencana Alam, Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kondisi Ekonomi dan Kondisi Sosial.

- 3) Pada proses mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban didalam keuangan desa telah sesuai dilaksanakan oleh pemerintah desa dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, tercatat dengan baik dan terperinci yang telah disusun dengan baik didalam setiap laporan keuangan desa.

Referensi :

- Ghozali, I. (2020). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Siregar, B. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D.
- Jurnal:**
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15-19.
- Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)*, 6(1), 1-14.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1). 15-29.
- I Wayan, Syahputra. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Kamuli, S., Wantu, S. M., Hamim, U., Djafar, L., Sahi, Y., & Dahiba, H. (2023). Pemberdayaan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Bagi Masyarakat Pesisir di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Provinsi Sulawesi Utara. *Jambura Journal Civic Education*, 3(2).
- Panggabean, F. Y. (2020). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan. 2(<https://ibmi-medan.com/ojs/ojsibmi/index.php/JIBMI/issue/view/28>).
<https://ibmi-medan.com/ojs/ojsibmi/index.php/JIBMI/article/view/76>
- Nurlailah., Syamsul., & Rahman, A. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan Sigi. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 3(2). 151-165.
- Panjaitan, D.K., Rokan, M.K., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara). *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1). 1200-1209.
- Prihatin, G. F., Afifi, M., & Singandaru, A. B. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa: Studi Kasus: Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-23.
- Ramadhan, P. R., Fitri Y. P., Nia P. L. (2023). Paradoks Modernisasi Vis A Vis dehumanisasi Dalam pengelolaan Keuangan Desa. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniorae-ISSN:2775-4049 SCENARIO 2023*.
- Rahmadani, I. A., Setiawati, B., & Suwandi, S. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Japb*, 3(1), 67-80.
- Rahum, Abu. (2020). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik

Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser". Jurnal Pemerintahan , Vol. 3 No. 4.

Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa(SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(3).

Website

<https://djp.kemenkeu.go.id>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang "Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang "Desa".